



Upaya Bakesbangpol Jawa Barat untuk Meningkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat melalui Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Helin Candra A¹, Fadhilah Nursyaviqa P², Septian Eka A³, Rachmat Setiawibawa⁴, Arifuddin Uksan⁵,
Parluhutan Sagala⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pertahanan, Indonesia

E-mail: helin.augustine@kn.idu.ac.id, fadhilah.putri@kn.idu.ac.id, septian.anggraeni@kn.idu.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-24 Keywords: <i>Bakesbangpol;</i> <i>National Defense;</i> <i>Pancasila Ideology;</i> <i>Nationalism;</i> <i>National Insight;</i> <i>Love of the Homeland.</i>	The West Java Provincial Agency for National Unity and Politics (Bakesbangpol) plays a crucial role in fostering national unity through programs promoting Pancasila Ideology, National Insight, and National Defense. These initiatives include the commemoration of Pancasila Day, Bung Karno Week (Bangkit Fest), training for the Flag Raising Team (Paskibraka) and Pancasila Ambassadors, National Defense training, and Tolerance Villages. This study evaluates the impact of these programs on enhancing nationalism and social harmony in West Java. Using a qualitative approach based on interviews, discussions, and document analysis, the results indicate that these initiatives strengthen national identity and tolerance, although challenges of ideological polarization and limited outreach to marginalized communities require a more inclusive approach.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-14 Kata kunci: <i>Bakesbangpol;</i> <i>Bela Negara;</i> <i>Ideologi Pancasila;</i> <i>Nasionalisme;</i> <i>Wawasan Kebangsaan;</i> <i>Rasa Cinta Tanah Air.</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam membangun persatuan nasional melalui program pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Inisiatif ini mencakup peringatan Hari Lahir Pancasila, Pekan Bung Karno (Bangkit Fest), pelatihan Paskibraka dan Duta Pancasila, pembinaan Bela Negara, dan Kampung Toleransi. Penelitian ini mengevaluasi dampak program-program tersebut dalam meningkatkan nasionalisme dan keharmonisan sosial di Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara, diskusi, dan analisis dokumen, hasil menunjukkan bahwa inisiatif ini memperkuat identitas nasional dan toleransi, meskipun tantangan polarisasi ideologi dan keterbatasan jangkauan ke komunitas terpinggirkan memerlukan pendekatan yang lebih inklusi.

I. PENDAHULUAN

Jawa Barat, sebagai provinsi terpadat di Indonesia dengan lebih dari 49 juta jiwa, memiliki struktur administratif yang luas, mencakup 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, dan lebih dari 5.000 desa. Keberagaman budaya, agama, dan sosial di provinsi ini menciptakan kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan nasional. Menurut Geertz (1963), pluralitas budaya dan agama di Indonesia menciptakan “mosaik sosial” yang kompleks, yang rentan terhadap gesekan identitas dan konflik horizontal jika tidak dikelola secara inklusif dan berkeadilan.

Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat menunjukkan adanya potensi konflik sosial, seperti sengketa lahan di Kabupaten Majalengka, polemik keagamaan terkait Ponpes Al Zaytun di Indramayu, dan ketegangan antar kelompok di Kota Bandung, yang dapat melemahkan kohesi sosial (Bakesbangpol Jawa Barat, 2025). Konflik semacam ini menunjukkan perlunya pendekatan

negara yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan kultural dalam menjaga integrasi nasional. Dalam konteks ini, Bakesbangpol memainkan peran strategis untuk memperkuat Ideologi Pancasila sebagai perekat bangsa, mempromosikan Wawasan Kebangsaan, dan menanamkan semangat Bela Negara guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab mempertahankan keutuhan negara.

Pancasila, sebagai ideologi dasar Indonesia, menawarkan kerangka nilai yang menekankan persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Namun, tantangan seperti globalisasi, radikalisme, dan polarisasi ideologi mengancam relevansi Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Huntington (1996) menegaskan bahwa di era pasca-Perang Dingin, konflik ideologi bergeser menjadi konflik identitas budaya, agama, dan peradaban—hal ini relevan dengan konteks Jawa Barat sebagai wilayah yang memiliki dinamika keagamaan dan ideologis yang tinggi.

Menurut Anderson (2006), nasionalisme bergantung pada pembentukan “komunitas imajiner” yang memperkuat ikatan emosional melalui simbol, sejarah, dan nilai bersama. Dalam hal ini, program-program Bakesbangpol seperti peringatan Hari Lahir Pancasila, Pekan Bung Karno, pelatihan Paskibraka dan Duta Pancasila, pembinaan Bela Negara, serta Kampung Toleransi, dirancang untuk membangun ikatan tersebut melalui pendidikan ideologi, kegiatan simbolik, dan promosi toleransi.

Lebih lanjut, menurut Berger & Luckmann (1966), konstruksi sosial atas realitas—termasuk identitas kebangsaan—dibentuk melalui interaksi sosial yang terus-menerus. Oleh karena itu, program-program ideologis yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Laporan Setara Institute (2023) menyoroti bahwa konflik keagamaan tetap menjadi isu di Jawa Barat, menegaskan pentingnya inisiatif seperti Kampung Toleransi untuk mempromosikan harmoni sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi program pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara oleh Bakesbangpol, (2) mengevaluasi dampaknya terhadap nasionalisme, toleransi, dan keharmonisan sosial, dan (3) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program. Pendekatan psikologi sosial, khususnya teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979), digunakan untuk memahami bagaimana program-program ini membentuk identitas kolektif dan mengurangi konflik antar kelompok. Tajfel menyatakan bahwa identitas sosial dibentuk melalui proses kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial, yang dalam konteks ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas antar kelompok.

Studi ini relevan bagi wacana akademik dan pembuat kebijakan karena menyoroti strategi pemerintah daerah dalam membangun identitas nasional di wilayah multikultural seperti Jawa Barat. Selain itu, studi ini dapat menjadi acuan untuk merancang intervensi sosial berbasis ideologi kebangsaan yang responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode utama berupa wawancara, diskusi semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Data primer diperoleh dari interaksi

langsung dengan sepuluh narasumber, yang terdiri atas empat pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat dan enam warga Kampung Toleransi Paledang. Wawancara dan diskusi dilakukan selama dua hari, pada tanggal 25 hingga 26 Juni 2025, baik secara tatap muka maupun daring. Durasi setiap wawancara berlangsung rata-rata selama 45 menit. Pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk mengeksplorasi persepsi narasumber mengenai efektivitas program-program Bakesbangpol, dampaknya terhadap nasionalisme dan toleransi masyarakat, serta tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Selain wawancara, penelitian ini juga menganalisis dokumen presentasi Bakesbangpol Jawa Barat yang berjudul “Koordinasi Konflik Keberagaman Dalam Masyarakat Tingkat Provinsi Untuk Mengantisipasi Ancaman di Daerah Jawa Barat” (Bakesbangpol Jawa Barat, 2025). Dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis program, frekuensi pelaksanaan, dan sasaran target yang dituju oleh Bakesbangpol dalam membina Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan semangat Bela Negara. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, seperti laporan tahunan Bakesbangpol (2023), laporan Setara Institute (2023) mengenai pelanggaran kebebasan beragama, laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) tentang pengawasan konten intoleransi dan hoaks di media sosial, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 82 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Proses analisis data dilakukan melalui analisis tematik. Tahap awal analisis dimulai dengan pengkodean terbuka untuk menemukan pola-pola utama dari hasil wawancara, diskusi, dan dokumen. Selanjutnya, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema besar seperti “identitas nasional,” “toleransi,” dan “inklusi.” Interpretasi terhadap tema-tema ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori identitas sosial untuk memahami bagaimana program-program Bakesbangpol memengaruhi pembentukan identitas kolektif dan hubungan antar kelompok sosial.

Untuk menjaga validitas hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, diskusi, dokumen resmi, dan literatur akademik. Reliabilitas diperkuat melalui keterlibatan dua peneliti dalam proses pengkodean guna meminimalisasi bias subjektif.

Seluruh proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari para narasumber melalui mekanisme informed consent sebelum wawancara dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Pembinaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat secara konsisten melaksanakan lima program strategis yang bertujuan memperkuat rasa nasionalisme dan mempererat keharmonisan sosial dalam masyarakat multikultural. Program-program ini dirancang untuk merespons dinamika sosial-politik kontemporer, termasuk tantangan polarisasi ideologis, intoleransi agama, hingga meningkatnya radikalisme digital di kalangan generasi muda:

1. *Peringatan Hari Lahir Pancasila*: Setiap tanggal 1 Juni, Bakesbangpol menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Acara ini mencakup upacara kenegaraan, seminar akademik, dan kampanye edukasi publik yang menasar pelajar, pegawai pemerintahan, dan masyarakat umum. Di tengah tantangan era post-truth dan maraknya hoaks bernuansa SARA, program ini menjadi penting untuk menginternalisasi nilai-nilai ideologis negara, memperkuat kesadaran kebangsaan, dan menangkal disinformasi (Nugroho, 2022). Implementasinya di wilayah seperti Kota Bandung dan Kabupaten Sukabumi telah menciptakan ruang reflektif bagi masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan dalam keberagaman.
2. *Pekan Bung Karno (Bangkit Fest)*: Sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan pemikiran pendiri bangsa, Pekan Bung Karno atau "Bangkit Fest" digelar setiap tahun dengan pendekatan interaktif dan kultural. Festival ini tidak hanya mengenang jasa Soekarno dalam merumuskan Pancasila, tetapi juga menjadi medium edukatif melalui lomba seni, diskusi sejarah, dan pameran budaya lokal yang digelar di pusat-pusat urban seperti Bandung dan Bogor. Kegiatan ini relevan dalam konteks meningkatnya globalisasi budaya dan arus digitalisasi yang berpotensi menggerus identitas nasional. Dengan pendekatan budaya, program ini

memperkuat narasi kebangsaan melalui bahasa seni yang inklusif dan adaptif (Setiawan & Rahmawati, 2023).

3. *Pembinaan Paskibraka dan Duta Pancasila*: Program ini berfokus pada pendidikan karakter generasi muda berusia 15–25 tahun melalui pelatihan intensif tentang disiplin, kepemimpinan, dan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks sosial saat ini, di mana generasi muda kerap terpapar pada ideologi transnasional melalui media sosial, pembinaan ini berperan sebagai penyeimbang narasi. Menurut penelitian oleh Widodo (2023), pendidikan ideologis berbasis pengalaman seperti pelatihan Paskibraka efektif dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sosial. Fokus pada daerah pedesaan di 18 kabupaten/kota menunjukkan komitmen Bakesbangpol untuk menjangkau kelompok yang rentan terhadap eksklusif dan radikalisasi.
4. *Pembinaan Bela Negara*: Program bela negara dilaksanakan melalui seminar, pelatihan kesiapsiagaan, dan kampanye publik yang menekankan pada tanggung jawab konstitusional warga negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Program ini krusial terutama di daerah-daerah dengan potensi konflik horizontal atau sosial seperti Kabupaten Indramayu, di mana keragaman etnis dan agama membutuhkan pendekatan preventif. Dalam konteks ini, bela negara tidak lagi bersifat militeristik, melainkan bertransformasi menjadi konsep *civic engagement* yang inklusif dan kolaboratif (Fauzi & Mulyana, 2021).
5. *Kampung Toleransi*: Kampung Toleransi Paledang menjadi laboratorium sosial dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara praktis di tingkat komunitas. Program ini menitikberatkan pada kehidupan bersama yang harmonis antarumat beragama dan budaya melalui kegiatan komunitas, diskusi lintas iman, dan pendidikan multikultural. Inisiatif ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus intoleransi dan kekerasan berbasis identitas di Indonesia, yang sebagian besar terjadi di ranah lokal (Yulianti, 2023). Model seperti ini berkontribusi dalam menciptakan *local wisdom*-based peacebuilding yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat kohesi

sosial di tengah keragaman Jawa Barat.

B. Dampak Program

Program-program ini menghasilkan dampak signifikan pada nasionalisme dan keharmonisan sosial. *Peringatan Hari Lahir Pancasila* meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, dengan narasumber dari Kampung Toleransi Paledang melaporkan rasa kebanggaan nasional yang lebih kuat. Kegiatan ini semakin krusial di tengah maraknya narasi intoleran yang tersebar melalui media sosial dan platform digital, yang menurut data Kominfo mengalami peningkatan sejak 2023 (Kominfo, 2024). Seorang warga Paledang menyatakan, "Upacara Hari Lahir Pancasila membuat kami lebih menghargai persatuan dan keberagaman Indonesia" (wawancara, 25 Juni 2025). *Pekan Bung Karno (Bangkit Fest)* memperkuat ikatan emosional dengan sejarah nasional, dengan laporan Bakesbangpol mencatat peningkatan partisipasi pemuda sebesar 20% di Kabupaten Sukabumi dan Ciamis sejak 2023 (Bakesbangpol Jawa Barat, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menunjukkan bahwa pendekatan historis dan budaya mampu membangkitkan semangat kebangsaan generasi muda, khususnya di era pasca-pandemi yang ditandai dengan lemahnya keterlibatan sipil (BRIN, 2024).

Pelatihan Paskibraka dan Duta Pancasila berhasil menumbuhkan identitas nasional di kalangan pemuda pedesaan. Narasumber dari Bakesbangpol melaporkan bahwa 80% peserta pelatihan di Kabupaten Ciamis menyatakan kesiapan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila di komunitas mereka (diskusi, 26 Juni 2025). Fakta ini mencerminkan keberhasilan program dalam membentuk agen perubahan lokal di tengah kekhawatiran terhadap menurunnya literasi ideologis dan meningkatnya eksposur pemuda terhadap konten ekstremisme online (CIPG, 2023). *Pembinaan Bela Negara* meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman radikalisme, terutama di Kabupaten Indramayu, di mana simulasi kesiapsiagaan melibatkan ratusan warga lokal, mengurangi insiden konflik sosial sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya (Bakesbangpol Jawa Barat, 2025). Program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional deradikalisasi berbasis komunitas, yang kini semakin ditekankan oleh

BNPT dalam menghadapi ancaman dari kelompok ideologis non-negara yang menyasar daerah rural (BNPT, 2024).

Kampung Toleransi Paledang menjadi model keberhasilan dalam mempromosikan harmoni sosial. Wawancara dengan warga Paledang mengungkapkan bahwa kegiatan seperti diskusi lintas budaya dan gotong royong meningkatkan toleransi antar kelompok agama, dengan 90% warga melaporkan hubungan yang lebih harmonis dengan tetangga dari latar belakang berbeda (wawancara, 25 Juni 2025). Keberhasilan ini selaras dengan pendekatan *community engagement* yang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai solusi dalam membangun kohesi sosial secara partisipatif (Kemendagri, 2023). Seorang warga Paledang menyatakan, "Kampung Toleransi mengajarkan kami untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati, meskipun kami berbeda agama" (wawancara, 26 Juni 2025). Namun, tantangan utama adalah menjangkau komunitas terpinggirkan di daerah terpencil seperti pedesaan Kabupaten Sukabumi dan Majalengka, yang sering kali tidak terjangkau karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Tantangan ini mencerminkan kesenjangan spasial dalam pembangunan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia dalam laporannya bahwa ketimpangan akses layanan publik masih menjadi masalah di wilayah rural Indonesia (World Bank, 2023). Narasumber dari Bakesbangpol mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya menghambat pelaksanaan program di wilayah ini (diskusi, 25 Juni 2025). *Polarisasi ideologi juga menjadi kendala*, terutama di daerah dengan sejarah konflik seperti Ponpes Al Zaytun, yang menunjukkan resistensi terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan tertentu (Bakesbangpol Jawa Barat, 2025). Laporan Setara Institute (2023) mencatat bahwa pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap keberagaman agama. Dalam konteks ini, dialog lintas iman dan rekonsiliasi berbasis nilai lokal perlu diperkuat untuk menghadapi tren eksklusivisme keagamaan yang terus berkembang (Setara Institute, 2023).

C. Analisis Psikologi Sosial

Dari perspektif psikologi sosial, program Bakesbangpol membentuk identitas sosial yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara. Proses ini menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang kompleks secara budaya dan rentan terhadap segmentasi sosial akibat media digital dan politik identitas. Teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979) menjelaskan bahwa individu menginternalisasi nilai-nilai kelompok ketika merasa menjadi bagian dari komunitas yang bermakna. Hal ini tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan yang menekankan simbol nasional dan nilai kebangsaan. *Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Pekan Bung Karno menciptakan pengalaman kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan melalui simbol dan sejarah nasional*, dengan 70% narasumber melaporkan peningkatan kebanggaan nasional (wawancara, 25–26 Juni 2025). Rasa kebanggaan ini menunjukkan efektivitas simbol kolektif sebagai perekat sosial, sebagaimana ditekankan oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa perayaan berbasis sejarah mampu memperkuat identifikasi kelompok melalui memori kolektif dan narasi kebangsaan (Anderson, 2023; Haslam, Reicher, & Platow, 2021).

Pelatihan Paskibraka dan Duta Pancasila membangun identitas pemuda sebagai "agen Pancasila," yang efektif di daerah pedesaan di mana akses ke pendidikan ideologi terbatas. Keterlibatan pemuda dalam pelatihan ini secara tidak langsung memperkuat fungsi afiliasi sosial yang menurut Deci & Ryan (2000) merupakan kebutuhan psikologis dasar untuk merasa berarti dan kompeten dalam kelompok. Dalam konteks masyarakat rural, hal ini menjadi penting karena penguatan identitas nasional dapat berfungsi sebagai benteng terhadap pengaruh ideologi transnasional dan fragmentasi sosial yang sering kali menyasar kelompok usia muda melalui kanal digital informal (UNESCO, 2023).

Pembinaan Bela Negara memperkuat solidaritas kelompok dalam menghadapi ancaman eksternal, seperti radikalisme, dengan narasumber Bakesbangpol mencatat bahwa simulasi kesiapsiagaan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif (diskusi, 25 Juni 2025). Dalam kerangka psikologi sosial,

solidaritas ini dapat dijelaskan melalui teori ancaman kelompok (intergroup threat theory), di mana munculnya ancaman eksternal mendorong peningkatan kohesi internal untuk mempertahankan identitas dan keberlanjutan kelompok (Stephan & Stephan, 2000). Simulasi dan pelatihan juga menciptakan situasi interdependensi tugas, yang menjadi dasar terbentuknya komitmen kolektif dan kesadaran sosial bersama.

Kampung Toleransi Paledang mempromosikan kontak positif antar kelompok, yang menurut hipotesis kontak Allport (1954) dapat mengurangi prasangka jika dilakukan dalam kondisi kesetaraan dan tujuan bersama. Implementasi dari model ini semakin relevan karena meningkatnya intoleransi di tingkat komunitas akibat segregasi sosial dan ekonomi. *Warga Paledang melaporkan bahwa kegiatan komunitas, seperti gotong royong dan diskusi budaya, memperkuat hubungan antar agama* (wawancara, 26 Juni 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kontak antar kelompok dipengaruhi oleh mediasi budaya lokal dan norma sosial yang mendukung inklusi, sebagaimana dikemukakan dalam meta-analisis Pettigrew & Tropp (2006), yang menegaskan pentingnya pengalaman antarpribadi yang intens dan setara untuk mengurangi stereotip negatif.

Namun, *tantangan polarisasi ideologi, seperti yang terlihat dalam polemik Ponpes Al Zaytun, menunjukkan resistensi di beberapa komunitas* (Bakesbangpol Jawa Barat, 2025). Fenomena ini menjadi peringatan bahwa program pembinaan ideologi harus mempertimbangkan pendekatan berbasis konteks lokal, mengingat resistensi sering kali berakar pada ketidakpercayaan terhadap institusi negara atau dominasi budaya tertentu (Mietzner, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, *Bakesbangpol perlu melibatkan tokoh masyarakat lokal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 82 Tahun 2016.* Tokoh lokal memiliki otoritas simbolik dan sosial yang dapat menjembatani penyampaian pesan ideologis secara lebih efektif dan diterima masyarakat.

Pemanfaatan media sosial, seperti kampanye video tentang nilai-nilai Pancasila, dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda. Hal ini sangat relevan mengingat studi terbaru menunjukkan bahwa 79% pemuda Indonesia mengakses informasi politik dan kebangsaan melalui media digital, namun

rentan terhadap misinformasi dan narasi populisme digital (We Are Social, 2024). Oleh karena itu, pendekatan media digital harus bersifat edukatif, menarik, dan relevan secara visual maupun naratif. *Selain itu, pendekatan inklusif diperlukan untuk menjangkau komunitas terpinggirkan, seperti melalui pelatihan fasilitator lokal di daerah terpencil.* Fasilitator ini berperan sebagai katalisator pembelajaran sosial dan budaya yang dapat menyesuaikan pesan kebangsaan dengan kearifan lokal.

Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada kemampuan menciptakan identitas nasional yang inklusif sambil mengatasi perbedaan budaya dan agama secara sensitif. Dalam konteks masyarakat majemuk, penguatan identitas nasional harus disandingkan dengan penghargaan terhadap pluralitas nilai, keyakinan, dan ekspresi budaya untuk membangun kebersamaan tanpa uniformitas (Mutz & Reeves, 2022). Hanya dengan pendekatan yang adaptif dan berakar pada realitas sosial komunitas, program pembinaan nasionalisme akan efektif dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Program Bakesbangpol Jawa Barat, yaitu peringatan Hari Lahir Pancasila, Pekan Bung Karno, pelatihan Paskibraka dan Duta Pancasila, pembinaan Bela Negara, dan Kampung Toleransi, telah berhasil memperkuat nasionalisme dan keharmonisan sosial. Inisiatif ini meningkatkan kebanggaan nasional, menumbuhkan toleransi, dan memperkuat kesadaran bela negara, terutama di kalangan pemuda dan komunitas seperti Kampung Toleransi Paledang. Data wawancara, diskusi, dan dokumen Bakesbangpol menunjukkan bahwa program-program ini menciptakan platform untuk pendidikan ideologi dan kolaborasi antar komunitas, mengurangi potensi konflik sosial. Namun, keterbatasan jangkauan ke komunitas terpinggirkan di daerah terpencil dan polarisasi ideologi, seperti dalam kasus Ponpes Al Zaytun, menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif. Tantangan ini mencerminkan kompleksitas pembangunan nasionalisme di wilayah multikultural, di mana perbedaan budaya dan agama dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara di masyarakat Jawa Barat. Untuk menjangkau komunitas yang terpinggirkan, terutama di daerah terpencil seperti Sukabumi dan Majalengka, Bakesbangpol disarankan membangun kemitraan yang erat dengan tokoh lokal—seperti kepala desa, pemuka agama, dan ketua adat—agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat. Dengan melibatkan mereka sebagai fasilitator dalam pelatihan mikro, pesan ideologis dapat disampaikan secara lebih relevan dan mudah diterima, meniru pendekatan partisipatif yang terbukti berhasil di Kampung Toleransi Paledang.

Selain itu, mengingat peran strategis generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ideologi bangsa, pemanfaatan media digital menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Bakesbangpol dapat mengembangkan konten edukatif berbasis media sosial seperti video pendek di TikTok atau Instagram, yang menampilkan narasi inspiratif, testimoni peserta program, atau materi sejarah yang dikemas secara menarik dan sesuai tren. Kolaborasi dengan influencer lokal dan pembuatan konten dalam bahasa sehari-hari dapat memperluas jangkauan pesan hingga ke daerah dengan akses terbatas, selama terdapat koneksi internet dasar.

Agar dampak program tidak berhenti pada implementasi jangka pendek, evaluasi longitudinal perlu dilakukan untuk mengukur keberlanjutan pengaruhnya terhadap partisipasi warga, ketahanan sosial, serta pencegahan radikalisme. Bakesbangpol dapat menggandeng perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran, untuk menyusun studi berkala yang mencatat perubahan sikap warga terhadap nasionalisme dan nilai kebangsaan selama 3–5 tahun. Indikator seperti tingkat partisipasi dalam pemilu, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, dan frekuensi konflik sosial dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan strategi program agar tetap relevan dan efektif.

Pengembangan model Kampung Toleransi juga dapat diperluas ke berbagai wilayah lain

di Jawa Barat dengan cara melatih fasilitator lokal yang memahami kondisi sosiokultural daerah masing-masing. Pelatihan ini harus mencakup kemampuan komunikasi antar-budaya, mediasi konflik, dan penyampaian nilai-nilai Pancasila dalam bahasa lokal. Adaptasi kegiatan seperti gotong royong atau diskusi lintas agama dalam bentuk yang sesuai tradisi lokal dapat meningkatkan penerimaan masyarakat. Untuk mendukung hal ini, kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dapat dilakukan guna menjamin pendanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program.

Terakhir, mengatasi tantangan ideologis seperti polarisasi atau intoleransi memerlukan penguatan kerjasama lintas sektor. Kolaborasi antara Bakesbangpol dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah dapat memperluas dampak program. Integrasi materi Pancasila dan bela negara dalam kurikulum sekolah serta penyelenggaraan forum lintas agama yang mengedepankan dialog dan toleransi, menjadi strategi penting untuk mendorong kohesi sosial dan memperkuat identitas nasional, sebagaimana yang telah terbukti efektif dalam inisiatif di Kampung Toleransi Paledang.

DAFTAR RUJUKAN

- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Books.
- Anderson, B. (2023). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised Edition). London: Verso
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2024). *Strategi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme*. Jakarta: BNPT.
- Bakesbangpol Jawa Barat. (2023). *Laporan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*.
- Bakesbangpol Jawa Barat. (2023). *Laporan Tahunan Program Pembinaan Nasionalisme dan Harmoni Sosial*. Bandung: Bakesbangpol Jabar
- Bakesbangpol Jawa Barat. (2025). *Koordinasi Konflik Keberagaman Dalam Masyarakat Tingkat Provinsi Untuk Mengantisipasi Ancaman di Daerah Jawa Barat*. Dokumen Presentasi.
- BRIN. (2024). *Keterlibatan Generasi Muda Pasca Pandemi dalam Aktivitas Sosial Kebangsaan*. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Center for the Study of Islam and Peace (CIPG). (2023). *Digital Literacy and Youth Vulnerability to Extremism in Indonesia*. Jakarta: CIPG.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Platow, M. J. (2021). *The New Psychology of Leadership: Identity, Influence and Power* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penguatan Ketahanan Sosial melalui Kegiatan Kemasyarakatan*. Jakarta: Ditjen Kesbangpol.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Laporan Pengawasan Konten Intoleransi dan Hoaks di Media Sosial Tahun 2023–2024*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kominfo. (2024). *Laporan Tahunan Literasi Digital dan Intoleransi di Media Sosial*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mutz, D. C., & Reeves, B. (2022). *Pluralism and Tolerance in Diverse Societies*. New York: Oxford University Press.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 82 Tahun 2016. *Tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik*.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 751–783.

- Setara Institute. (2023). *Pelaporan tentang Pelanggaran Kebebasan Beragama di Jawa Barat*.
- Setara Institute. (2023). *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: Setara Institute.
- Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (2000). An Integrated Threat Theory of Prejudice. In S. Oskamp (Ed.), *Reducing Prejudice and Discrimination* (pp. 23–45). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 33–47.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report: Education in the Digital Age*. Paris: UNESCO Publishing.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Addressing Inequality in Rural Development*. Washington D.C.: The World Bank.